

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peranan PLUT-KUMKM dalam pemberdayaan UMKM

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya.¹¹³

Hal ini sesuai yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM, peranan yang dilakukan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung yaitu memberikan layanan pendampingan dan pembinaan bagi para pelaku UMKM.

1. Layanan Pendampingan

Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah dapat melakukan pendampingan yang bertujuan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Wujud dari pendampingan misalnya dengan pemberian informasi, jasa konsultasi, akses ke perbankan dan lain-lain.¹¹⁴ Dalam hal ini sesuai dengan layanan pendampingan yang dilakukan PLUT-KUMKM melalui konsultan bisnis dalam 5 bidang yaitu:

¹¹³Hesti Kusuma, Abdul Juli dan Abdullah Said, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 1 No 2* (Malang: Universitas Brawijaya, 2017) hlm. 214

¹¹⁴JUD (Jubilee Enterprise), *Langkah Pertama Jadi Pengusaha UMKM*, (Yogyakarta: Jubilee Enterprise, 2016), hlm. 122

- a. Bidang Kelembagaan : Kelembagaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerja sama. Salah satu bentuk peraturan dari usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM yaitu Perizinan Usaha, Pelaku usaha kecil memang mendapat fasilitas tersebut dengan harapan usaha mereka bisa berkembang dan menggerakkan roda perekonomian nasional.

Hal tersebut sesuai dengan layanan pada bidang Kelembagaan yang ada di PLUT-KUMKM yaitu pembentukan dan pematapan kelembagaan Koperasi dan UMKM, fasilitasi legalitas, penguatan sentra UKM/Klaster/kawasan, pendataan, pendaftaran dan perijinan KUMKM, advokasi perlindungan KUMKM.¹¹⁵

- b. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM) : Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan.¹¹⁶

¹¹⁵ Cis nasional, “Gedung PLUT-KUMKM” dalam <http://cis-nasional.id/profil/> diakses pada 14 Desember 2017

¹¹⁶Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1,(Jakarta:Rajawali Pers,2015),hlm.24-25

Hal ini sesuai dengan layanan bidang Sumber Daya Manusia yang ada di PLUT-KUMKM yang meliputi pelatihan-pelatihan kewirausahaan, magang dan pendampingan pengembangan bagi para pelaku UMKM.

- c. Bidang Produksi : Konsep produksi menyatakan bahwa para konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dimanamana dan yang harganya murah. Para manajer bisnis yang berorientasi pada produksi memusatkan perhatian mereka pada upaya mencapai efisiensi produk tinggi, biaya rendah dan distribusi massa. Mereka mengasumsi bahwa para konsumen terutama menginginkan ketersediaan produk dengan harga-harga rendah.¹¹⁷

Hal ini sesuai dengan layanan bidang produksi yang ada di PLUT-KUMKM yang meliputi: efisiensi mutu produk, bahan baku, pengembangan produk (peningkatan kualitas, desain, merek, dan kemasan), dan diversifikasi produk.

- d. Bidang Pembiayaan : Saat pelaku UMKM ingin mengajukan pinjaman ke bank, namun belum dapat memenuhi persyaratan seperti diketahui bank sangat ketat dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Bank biasanya menganalisis kelayakan usaha dengan menggunakan metode 5C yakni *character* (karakter pribadi), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan). Salah satu saja dari persyaratan tersebut tidak

¹¹⁷Winardi, *Entrepreneur dan entrepreneurship*, (Jakarta:Kencana, 2008) hlm. 274

dapat dipenuhi, biasanya bank akan menolak permohonan kredit yang diajukan.¹¹⁸

Hal ini sesuai dengan layanan yang ada di PLUT-KUMKM yang meliputi penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan Bank dan non Bank, pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan.

- e. Bidang Pemasaran : Dalam hal pemasaran, pengusaha pemula dihadapkan pada terbatasnya informasi pasar yang dapat dijangkau, keterbatasan kemampuan untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar, serta tekanan-tekanan persaingan dari pelaku usaha yang telah eksis sebelumnya.¹¹⁹

Hal ini sesuai dengan layanan yang ada di PLUT-KUMKM yang meliputi: informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT (e-commerce), serta pengembangan data base yang terkait pengembangan KUMKM.

Selain layanan pendampingan oleh 5 konsultan bisnis dan pengelola PLUT-KUMKM terdapat layanan pada Galeri PLUT-KUMKM yaitu untuk memamerkan atau mempromosikan produk UMKM kabupaten Tulungagung serta sebagai gudang oleh-oleh.

¹¹⁸Lip Saripah dan Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: APRIL MEDIA, 2011), hlm.25

¹¹⁹Ibid.,

Galeri PLUT-KUMKM ini sangat penting karena seperti yang telah dinyatakan dalam bukunya Marius P. Angipora bahwa promosi dipandang sebagai arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertahanan dalam pemasaran.¹²⁰

2. Pembinaan PLUT-KUMKM

Untuk menjadi anggota binaan PLUT-KUMKM tidak ada persyaratan khususnya, pelaku UMKM hanya harus memiliki usaha sendiri dan diproduksi secara kontinu. Dengan menjadi anggota binaan PLUT-KUMKM para pelaku UMKM dapat dengan mudah mendapatkan informasi pembinaan seperti pelatihan, bimtek, temu usaha dan lain sebagainya.

Pembinaan yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM yaitu melalui beberapa program diantaranya program Pelatihan-pelatihan, Bimbingan Teknologi, Studi lapang, Pameran-pameran atau bazar, dan Temu Mitra tidak hanya dilakukan di dalam kota akan tetapi juga diluar kota.

Hal ini sesuai pernyataan dala bukunya JUD (Jubilee Enterprise) bahwa Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah juga dapat mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk memajukan UMKM. Bentuk pembinaan dan pelatihan misalnya berupa pelatihan teknis, lokakarya seminar, studi banding, membangun kerjasama dengan perusahaan-

¹²⁰Marius P. Angipora, Dasar-dasar Pemasaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), .hlm.241

perusahaan lain atau memberi kesempatan pada UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹²¹

Dalam hal pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui program pendampingan dan pembinaan PLUT-KUMKM ini sangat memberikan manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida Susi Dewanti dijelaskan bahwa dalam skema pemberdayaan yang dilakukan berbagai pihak kepada UMKM memberikan manfaat dalam megembangkan usaha mereka. Apalagi bagi usaha yang baru dirintis, manfaat yang dirasakan jauh lebih besar. Dampak yang dirasakan dari skema pemberdayaan tersebut antara lain mampu mengenalkan usaha kepada calon pembeli jika fasilitasi berupa pameran. Manakala fasilitasi berupa pelatihan mampu meningkatkan ketrampilan dan menambah wawasan bagi para pengusaha ini.¹²²

B. Kendala PLUT-KUMKM dalam Pemberdayaan UMKM

Adapun kendala yang dihadapi oleh PLUT-KUMKM dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung yaitu Kendala Internal dan Kendala Eksternal.

1. Kendala internal PLUT-KUMKM

Dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung terdapat kendala internal yang dihadapi PLUT-KUMKM yaitu

¹²¹JUD (Jubilee Enterprise), *Langkah Pertama Jadi Pengusaha UMKM*, (Yogyakarta: Jubilee Enterprise, 2016), hlm. 123

¹²²Ida Susi Dewanti, *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro: Kendala dan Alternatif Solusinya*, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6, No. 2 (Yogyakarta: UPN Veteran, 2010)

- a. Kurangnya pengalaman pengelolaan PLUT-KUMKM yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan PLUT-KUMKM kabupaten Tulungagung masih satu tahun berdiri sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM belum sepenuhnya teratasi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Hesseel Nogi S. Tangklisan bahwa pentingnya pengalaman organisasi bagi anggota lembaga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya. Dimanapun ia bekerja, manusia mendapatkan pengalaman kerja secara berkelompok dan berorganisasi. Baik di pemerintah maupun swasta, seseorang harus bekerja sama dengan oranglain demi tercapainya tujuan organisasi organisasi yang bersangkutan.¹²³

- b. Adanya SDM pengelola yang kurang sesuai dengan kompetensinya seperti konsultan bisnis yang kurang berkompeten dibidangnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Burhanuddin Yusuf tentang pentingnya sumber daya manusia, bahwa Sumber daya manusia merupakan suatu modal besar yang paling utama dalam setiap organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia, dapat dipastikan roda organisasi tidak akan bergerak. Pentingnya sumber daya manusia bukanlah hal yang menjadi kesadaran baru dari manusia. Peradapan manusia berpangkal pada usaha mengolah dan

¹²³Hessel Nogi S. Tangklisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta:PT Grasindo, 2005), hlm. 62

memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompeten, maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan.¹²⁴

- c. Kurangnya dukungan anggaran untuk menjalankan setiap program yang diadakan PLUT-KUMKM seperti program pelatihan, Bimtek dan pembinaan dan kegiatan lain yang diadakan PLUT-KUMKM.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Indra Bastian bahwa anggaran mempunyai posisi yang sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.¹²⁵

Hal ini juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Elsy Tiarawati, bahwa terdapat beberapa faktor hambatan dalam pemberdayaan yaitu terbatasnya anggaran dana untuk melakukan

¹²⁴Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1,(Jakarta:Rajawali Pers,2015),hlm.24-25

¹²⁵Indra Bastian, *Akuntansi sector Publik:Suatu Pengantar*,(Yogyakarta:PT GELORA AKSARA PRATAMA,2006),hlm.163

pelatihan, terbatasnya modal pengembangan usaha dan terbatasnya teknologi.¹²⁶

- d. Dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung berbagai pelaksanaan program PLUT-KUMKM. Hal ini juga salah satu kendala yang dihadapi PLUT-KUMKM yaitu Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan yang diadakan PLUT-KUMKM.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Lip saripah dan Erna Hernawati tentang sarana dan prasarana yaitu upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dapat terhambat bila lingkungan bisnisnya tidak mendukung. Maksud lingkungan bisnis disini adalah ketersediaan modal yang bisa diakses oleh para calon pengusaha pemula, informasi dan sarana prasarana yang memadai, serta bantuan teknis dari pihak-pihak yang berkompeten.¹²⁷

2. Kendala eksternal UMKM

Untuk kendala eksternal yang dihadapi PLUT-KUMKM dalam Pemberdayaan UMKM yaitu:

- a. Belum semua SKPD (dinas terkait) mau bekerja sama dengan PLUT-KUMKM dalam memberdayakan UMKM (Egosektoral).

Dalam bukunya Marisa Gemiralda dijelaskan bahwa egosektoral ini memiliki kelemahan karena praktek ini akan membuat

¹²⁶Elsye Tiarawati, Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pemberdayaan Usaha Kripik Pisang di Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung(kajian etika bisnis Islam),*Skripsi*(Tulungagung:IAIN Tulungagung,2017)

¹²⁷Lip Saripah dan Hernawati,*Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*,(Bandung:APRIL MEDIA,2011),hlm.25

anggota organisasi menutup mata terhadap gambar besar tujuan organisasi sehingga umumnya menyingkirkan alternative-alternatif pencapaian tujuan secara kreatif dan inovatif. Mereka akhirnya juga menutup mata pada tugas-tugas dan fungsi unit luar, padahal sesungguhnya antar unit bisa saling besinergi.¹²⁸

- b. Minimnya sinergi antara perusahaan/lembaga keuangan/lembaga lainnya dengan PLUT-KUMKM terutama dalam hal CSR (Corporate Social Responsibility) / PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Hal ini sesuai dalam bukunya Nurdizal Rachman bahwa CSR adalah upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹²⁹

- c. System ekonomi yang semakin berkembang seperti pasar bebas (MEA). Dengan adanya system ekonomi pasar bebas maka persaingan akan semakin ketat dan para pelaku UMKM harus mandiri.

Hai ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Ranti Fauza Mayana bahwa pemerintah Indonesia telah menerima liberalisasi

¹²⁸Marisa Gemiralda, Peran Leader dalam Membangun budaya Jual yang Unggul, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2016), hlm.40

¹²⁹Nurdizal Rachman, Panduan Lengkap Perencanaan CSR, (Jakarta:Penebar Swadaya,2011), hlm.15

perdagangan yang dengan sendirinya menuntut penyesuaian diri dari para anggotanya, khususnya para pelaku bisnis itu sendiri. Persaingan selalu terjadi dalam system dunia usaha yang bebas. Hal ini merupakan suatu faktor penting dalam upaya memajukan perekonomian.¹³⁰

- d. Banyaknya UMKM yang belum tau tugas dan fungsi adanya PLUT-KUMKM, adanya UMKM yang enggan untuk bergabung menjadi binaan PLUT-KUMKM.

Hal ini juga terjadi dalam penelitian Fitri Maliani Nugraha yaitu Pasifnya keikutsertaan produsen tempe dan tahu dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan yang menyebabkan kurang optimalnya tujuan dari penyelenggaraan program tersebut.¹³¹

Selanjutnya banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kabupaten Tulungagung diantaranya yaitu mengenai keterbatasan modal usaha untuk memulai usaha maupun untuk perkembangan usahanya, kemudian kesulitan pengadaan bahan baku, kesulitan dalam pemasaran misalnya UMKM enggan untuk keluar dari pasar lokal yang dimiliki, lalu keterbatasan akses ke informasi mengenai

¹³⁰Ranti fauza Mayana, *Perlindungan desain industry di Indonesia dalam era perdagangan bebas*, (Yogyakarta:Grasindo,2004),hlm.17-18

¹³¹Fitri Maliani Nugraha, *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Oleh Suku Dinas Koperasi , UMKM, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Barat*, *Skripsi*(Serang:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,2015)

peluang pasar dan lain-lain, kualitas sumber daya manusia yang rendah dan rendahnya kemampuan teknologi, belum mengetahui dan malas dalam pengurusan legalitas usaha.

Dari hasil wawancara dengan para informan terdapat banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang menjadi binaan PLUT-KUMKM diantaranya yaitu kurangnya permodalan baik yang baru memulai usahanya ataupun usaha yang sudah berjalan, masih rendahnya SDM yang dimiliki, packaging produk yang kurang baik dan bahan baku yang sulit, banyak yang belum mengurus perijinan usaha, dan kesulitan dalam memasarkan produk UMKM.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Erfan syauqi Beik bahwa Masalah-masalah UMKM antara lain adalah:¹³²

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.

¹³²Irfan Syauqi Beik, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2016), hlm.132

- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media *online* telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
- d. Akses informasi usaha yang masih rendah.
- e. Belum berjaln kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam hal ini juga dinyatakan dalam bukunya Lip saripah dan Erna Hernawati bahwa Rintangan-rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan ijin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.¹³³

Dan hal ini juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kusuma, Abdul Juli dan Abdullah said yaitu terdapat hambatan dalam pemberdayaan UMKM, penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya

¹³³Lip Saripah dan Hernawati, *Memfaatkan Koperasi dan UMKM: Tindak lanjut Program PKH PNFI*, (Bandung: APRIL MEDIA, 2011), hlm. 27-28

manusia, terbatasnya anggaran yang dimiliki, kesulitan permodalan UKM, dan permasalahan teknis UKM.¹³⁴

C. Upaya PLUT-KUMKM dalam Mengatasi Kendala atau Permasalahan Pemberdayaan UMKM

Adapun upaya yang dilakukan PLUT-KUMKM dalam mengatasi kendala internal dan kendala eksternal pemberdayaan UMKM yaitu:

1. Upaya PLUT-KUMKM dalam Mengatasi Kendala Internal

Dari hasil wawancara dari informan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan PLUT-KUMKM dalam mengatasi permasalahan internal pemberdayaan UMKM yaitu:

- a. Melaksanakan pembinaan dan mengikutkan pelatihan-pelatihan guna peningkatan SDM yang dilakukan oleh Dinas atau instansi terkait sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM yang ahli dalam bidangnya/berkompeten serta menambah wawasan dan pengalaman dalam mengelola PLUT-KUMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini sesuai pernyataan dalam bukunya Burhanudin Yusuf tentang SDM, bahwa Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai individu yang merancang dan memproduksi keluaran dalam rangka pencapaian strategi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanpa individu yang memiliki keahlian atau kompeten,

¹³⁴Hesti Kusuma, Abdul Juli dan Abdullah Said, Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol 1 No 2 (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).

maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber daya manusia inilah yang membuat sumber daya lainnya dapat berjalan.¹³⁵

- b. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan cara bermitra misalnya dengan lembaga perbankan maupun non bank sehingga anggaran untuk pengembangan program PLUT-KUMKM seperti pelatihan, bimtek tidak mengalami kekurangan lagi dan pelaksanaan program-program PLUT-KUMKM dapat berjalan dengan maksimal.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Tiktik sartika tentang kemitraan usaha, bahwa kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM.¹³⁶

- c. Melakukan kerjasama dengan dinas terkait sehingga sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan PLUT-KUMKM memadai.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bukunya Asriyanti Syarif dan Mutmainah Zaenudin bahwa kerjasama (*cooperation*) yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama.¹³⁷

¹³⁵Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1,(Jakarta:Rajawali Pers,2015),hlm.24-25

¹³⁶Tiktik Sartika dan soejoedono Rachman,*Ekonomi Skala Kecil Menengah dan Koperasi*,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2002),hlm.30

¹³⁷Asriyanti Syarif dan Mutmainah Zainuddin,Inti sari Sosiologi Pertanian,(Makassar: CV Inti Mediatama,2017),hlm.12

2. Upaya PLUT-KUMKM dalam Mengatasi Kendala Eksternal

Upaya yang dilakukan PLUT-KUMKM dalam mengatasi kendala eksternal pemberdayaan UMKM yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam setiap kegiatan. Koordinasi-koordinasi yang dilakukan berupa mendatangi maupun menyurati SKPD.

Hal ini juga dinyatakan dalam bukunya Sarinah dan Mardalena bahwa koordinasi mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah dibagi, tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang penyampaian tujuan.¹³⁸

- b. Melakukan pendekatan-pendekatan dengan perusahaan dan lembaga-lembaga baik didalam kota maupun luar kota. Hal ini dilakukan agar terjadi sinergi antara PLUT-KUMKM dengan perusahaan / lembaga keuangan maupun lembaga lain dalam membeberdayakan UMKM.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Ardito Bhinadi bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja, namun memerlukan sinergi atau kerjasama dengan banyak pihak. Kerjasama pemerintah, swasta dan perguruan tinggi diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi yang lebih baik.¹³⁹

¹³⁸Sarinah dan Mardalena, Pengantar Manajemen,(Yogyakarta: Deepublish,2017),hlm.72

¹³⁹Ardito Bhinadi, Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat,(Yogyakarta:Deepublish,2017),hlm.77

- c. Mendukung upaya UMKM untuk mandiri melalui pasar bebas (MEA) dan teknologi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bukunya Bambang Rudito bahwa MEA merupakan suatu kesempatan melihat kawasan ASEAN menjadi suatu kesatuan yang dampaknya juga akan terasa kepada bangsa Indonesia.¹⁴⁰ Oleh sebab itu dukungan terhadap para pelaku UMKM sangat diperlukan agar UMKM local mandiri dan tidak kalah saing dengan UMKM luar negeri.

- d. Melakukan sosialisai baik secara langsung maupun melalui sosial media dan juga memberikan testimony atau contoh UMKM yang sudah sukses atau mandiri setelah mendapatkan binaan PLUT-KUMKM.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Ihromi tentang pengeritian sosialisai menurut David A. Goslin bahwa sosialisasi merupakan proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya.¹⁴¹

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan UMKM yang dilakukan PLUT-KUMKM yaitu melalui pendampingan kepelaku usaha secara bertahap.

¹⁴⁰Bambang Rudito, *Aparatur Sipil Negara*,(Jakarta; Kencana,2016),hlm.5

¹⁴¹ Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999),hlm.30

Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam bukunya Gunawan sumodiningrat dan Rachmad Ali tentang pendampingan, bahwa Peran pendamping UMKM sangatlah penting dan menentukan. Selain itu untuk mendampingi mengembangkan usaha yang dilakukan UMKM, pendamping ini juga membantu mempersiapkan UMKM agar dapat berhubungan dengan bank. Berurusan dengan bank bukanlah hal yang sulit, terutama untuk mendapatkan pinjaman atau dana penambahan usaha. Terutama kalau UMKM tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan standar yang ditentukan oleh bank atau lembaga keuangan formal.¹⁴²

Akan tetapi permasalahan UMKM bukan hanya ketika akan berhubungan dengan bank, tetapi juga ada banyak hal yang lain, seperti urusan teknik produksi, hingga manajemen keuangan dan pemasaran. Pada kondisi-kondisi seperti inilah sebenarnya peran pendamping UMKM diperlukan agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Pendampingan UMKM tersebut tentunya tidak dapat disamaratakan, tetapi harus dilihat satu per satu sesuai dengan kondisi dan permasalahannya.¹⁴³

Selain itu upaya yang dilakukan oleh PLUT-KUMKM dalam mengatasi permasalahan UMKM yaitu mengikutkan pelaku UMKM di berbagai pelatihan, Bimtek yang dilakukan dinas di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan juga mengadakan temu usaha, studi lapang, dan gelar produk/promosi produk di tingkat kabupaten, provinsi, dan Nasional.

¹⁴²Gunawan sumodiningrat dan Rachmad Ali, *Membangun dengan Hati Pengalaman Praktis BPR Danagung Membina dan membesarkan Usaha Nasabah*, (Yogyakarta:Grasindo,2015)hlm.25-29

¹⁴³Ibid.,

Hal ini juga dinyatakan dalam bukunya JUD (Jubilee Enterprise) yaitu Pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah juga dapat mengadakan pembinaan dan pelatihan untuk memajukan UMKM. Bentuk pembinaan dan pelatihan misalnya berupa pelatihan teknis, lokakarya seminar, studi banding, membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain atau memberi kesempatan pada UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.¹⁴⁴

Upaya-upaya tersebut merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM guna pemberdayaan UMKM, terdapat banyak manfaat dan perkembangan yang diperoleh oleh para pelaku UMKM yaitu produk yang dimiliki para pelaku UMKM semakin dikenal oleh masyarakat luas tidak hanya di Kabupaten tapi juga luar kota.

Hal ini juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida susi dewanti, bahwa skema pemberdayaan yang dilakukan berbagai pihak kepada UMKM memberikan manfaat dalam megembangkan usaha mereka. Apalagi bagi usaha yang baru dirintis, manfaat yang dirasakan jauh lebih besar.¹⁴⁵

¹⁴⁴JUD (Jubilee Enterprise),*Langkah Pertama Jadi Pengusaha UMKM*,(Yogyakarta:Jubilee Enterprise,2016),hlm.123

¹⁴⁵Ida Susi Dewanti, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro:Kendala dan Alternatif Solusinya,*Jurnal Administrasi Bisnis*,Vol.6,No.2 (Yogyakarta:UPN Veteran ,2010)